

**INTERVENSI RUSIA  
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT  
MELALUI INTERNET SEBAGAI ALAT KAMPANYE HITAM  
TAHUN 2016 DAN 2020  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AMEERA LUNA FIORENZA**

19323111

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**INTERVENSI RUSIA  
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT  
MELALUI INTERNET SEBAGAI ALAT KAMPANYE HITAM  
TAHUN 2016 DAN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AMEERA LUNA FIORENZA**

19323111

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Intervensi Rusia Dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat

### Melalui Internet Sebagai Alat Kampanye Hitam Tahun 2016 Dan 2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
24 Juni 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, each on a horizontal line. The top signature is 'Hangga Fathana', the middle one is 'Karina', and the bottom one is 'Masitoh'.

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Senin, 24 Juni 2024*



METERAI  
TEMPEL  
8EEALX168940908

---

*Ameera Luna Fiorenza*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian .....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Kerangka Pemikiran .....	9
1.7 Argumen Sementara .....	12
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.8.1 Jenis Penelitian.....	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.8.4 Proses Penelitian .....	13
1.9 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB 2 KONTEKS POLITIK LUAR NEGERI RUSIA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Pentingnya Amerika Serikat untuk Rusia.....	15
2.2 Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2016.....	17
2.2.1 Kebijakan Luar Negeri Hillary Clinton.....	18
2.2.2 Kebijakan Luar Negeri Donald Trump .....	21
2.3 Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020.....	22
2.4 Tujuan Intervensi Rusia Terhadap Amerika Serikat .....	27
2.4.1 Politik Luar Negeri Rusia.....	29
<b>BAB 3 INTERVENSI RUSIA DALAM PEMILIHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016 DAN 2020</b> .....	<b>31</b>
3.1 Sabotase.....	32
3.2 Spionase.....	36
3.3 Subversi .....	38
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>44</b>

4.1	Kesimpulan.....	44
4.2	Rekomendasi .....	45
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>

## ABSTRAK

Studi ini meneliti intervensi Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan 2020 melalui media sosial sebagai alat untuk strategi kampanye hitam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Rusia menggunakan media sosial untuk mempengaruhi pemilu 2016 dan 2020 dan bagaimana mereka menggunakan model propaganda "*firehose of falsehood*" dalam kampanye ini. Berfokus pada manipulasi Rusia melalui entitas seperti *Internet Research Agency* dan eksploitasi algoritma media sosial, studi ini menyoroti dampak signifikan dari campur tangan asing terhadap demokrasi AS. Dengan memeriksa kedua pemilu, penelitian ini memberikan pandangan komprehensif tentang metode intervensi Rusia yang berkembang dan tanggapan AS terhadap ancaman ini. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memahami berbagai pendekatan yang digunakan pada tahun 2016 dan 2020, menunjukkan adaptasi taktik meskipun ada upaya mitigasi. Analisis ini menawarkan wawasan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menjaga integritas pemilu dan melindungi proses demokrasi di masa depan.

*Keywords: Intervensi Rusia, Cyber, Integritas Pemilu, Pemilu Presiden*

## ABSTRACT

*This study examines Russia's intervention in the United States presidential elections of 2016 and 2020 through social media as a tool for black campaign strategies. The research aims to analyze how Russia employed social media to influence the 2016 and 2020 elections and how they utilized the "firehose of falsehood" propaganda model in these campaigns. Focusing on Russia's manipulation through entities like the Internet Research Agency and the exploitation of social media algorithms, the study highlights the significant impact of foreign interference on U.S. democracy. By examining both elections, this research provides a comprehensive view of the evolving methods of Russian intervention and the U.S. responses to these threats. The findings underscore the importance of understanding the different approaches used in 2016 and 2020, showing the adaptation of tactics despite mitigation efforts. This analysis offers insights into developing more effective strategies to safeguard electoral integrity and protect democratic processes in the future.*

*Keywords: Russian intervention, U.S. presidential elections, Cyber, Electoral integrity*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Amerika Serikat merupakan negara demokrasi representatif. Demokrasi dan Republik, Amerika Serikat menganut nilai dasar keduanya, dimana warga negara memegang kekuatan politik tertinggi, yang merupakan unsur demokrasi namun juga tetap memiliki unsur republik karena wakil-wakil yang terpilih memiliki kekuasaan politik. Namun tetap, semua representasi dipilih oleh masyarakat untuk mewakili ide-ide dan keprihatinan warga dalam pemerintahan. Semua itu pun harus melalui proses pemilihan. Memilih adalah salah satu cara untuk berpartisipasi dalam demokrasi, dan pemilihan umum atau kerap disebut Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan tokoh dalam suatu periode (Rohim 2014). Hal tersebut menjadikan pemilu sebagai momentum yang sangat penting dalam keberlangsungan pemerintahan Amerika Serikat dan momen yang sangat krusial tak hanya untuk warga negara Amerika Serikat namun juga negara-negara lain.

Mengingat kedudukan yang Amerika Serikat miliki dalam hal kuasa dan kekuatan politik di kancah dunia, menjadi pemilihan presiden ini suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh negara lain karena siapapun yang terpilih menjadi kepala dalam kepemimpinan negara adidaya itulah yang akan memegang kekuasaan terbesar di dunia. Momen-momen inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara berkuasa lainnya untuk melancarkan aksi mereka dalam mempropagandakan politik negara itu, salah satunya Rusia. Bukanlah informasi



baru untuk kita semua bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia berakar dari bertahun-tahun yang lalu, tepatnya setelah perang dunia kedua. Kemenangan sekutu setelah mengalahkan Jerman Nazi yang akhirnya menyisakan Amerika Serikat dan Rusia, yang pada saat itu masih disebut Uni Soviet, sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan kekuatan militer yang besar. Amerika Serikat dengan liberalisme dan kapitalisme-nya yang sangat kental berbanding terbalik dengan Rusia yang sosialis dan komunis. Persaingan tersebut tidak hanya berhenti dalam aspek ideologi namun menjalar kepada aspek-aspek lain seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya. Adapun upaya-upaya oleh Rusia untuk mengguncangkan pertahanan Amerika Serikat, salah satunya ialah untuk mempengaruhi politik Amerika Serikat dengan kampanye hitam dalam pemilihan presiden.

Pada tahun 2016, tepatnya saat masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat, timbul akun-akun facebook yang mengaku sebagai warga negara AS menyebarkan berita-berita atau informasi yang memancing kontroversi atau materi sayap kanan pro-Trump, upaya halus mereka untuk mendorong pemilih kulit hitam untuk memboikot pemilu atau memilih kandidat pihak ketiga yang kurang dihargai. Terdapat suatu lembaga *state-sponsored* bernama *Internet Research Agency* (IRA) berasal dari Rusia, yang diduga dalang dari akun-akun tersebut. Kasus tersebut pun ditelusuri lebih jauh oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang kemudian dilanjutkan dengan tudingan warga negara dan perusahaan Rusia didakwa melakukan sebuah persekongkolan kriminal dan spionase karena ikut campur dalam kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) di 2016 dengan mendukung Donald Trump dan menyudutkan kandidat lainnya, Hillary Clinton.

Dalam dakwaan tersebut juga tertulis bahwa Rusia dituding mengadopsi akun daring palsu untuk membuat pesan yang memecah belah, lalu pergi ke Amerika Serikat untuk mengumpulkan para intelijen, mengunjungi 10 negara bagian, dan mengadakan demonstrasi politik sebagai warga lokal. Klaim tersebut pun dibuktikan dengan keluarnya laporan intelijen rahasia AS yang berisikan keterlibatan pemerintah Rusia dalam kasus tersebut. Secara garis besar, campur tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden AS 2016 mengambil tiga perbedaan bentuk, salah satunya dalam ruang lingkup analisis kami:

1. Upaya untuk meretas sistem pemungutan suara *online* (seperti yang dirinci oleh Senat Terpilih Amerika Serikat pada Laporan Komite Intelijen).
2. Serangan siber yang menargetkan Komite Nasional Demokrat, yang dilakukan oleh GRU, yang menyebabkan kebocoran terkendali melalui Wikileaks dari data email yang terkait dengan Clinton tim kampanye presiden.
3. Operasi pengaruh sosial yang luas dan berkelanjutan yang terdiri dari berbagai taktik disinformasi terkoordinasi yang ditujukan langsung pada warga AS, yang dirancang untuk digunakan pengaruh politik dan memperburuk perpecahan sosial dalam budaya AS.

Upaya yang dinamai Proyek Lakhta itu diketahui sangat canggih, bersifat jangka panjang, dan didanai dengan baik (Nainggolan 2020). Namun, pernyataan tersebut ditolak oleh Vladimir Putin, selaku Presiden Rusia, dengan mengatakan bahwa negaranya sama sekali tidak memiliki andil dalam upaya untuk memengaruhi pemilihan presiden Amerika Serikat dan mengatakan bahwa dugaan tersebut hanya omong kosong belaka. Terlepas dengan beberapa bukti pendanaan

oleh Rusia yang telah diberikan pada laporan intellijen rahasia AS, Rusia masih membantah klaim kontribusi tersebut. Donald Trump, selaku Presiden terpilih pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 itu pun mendukung pernyataan Putin dengan menegaskan bahwa kemenangannya murni dan tidak ada sangkut pautnya dengan upaya kampanye hitam dari siapapun. Pada akhirnya, Rusia tidak diadili dengan hukuman yang serius karena kurangnya pondasi dan juga Warga negara Rusia yang dituduh kemungkinan tidak akan ditangkap atau muncul di pengadilan Amerika Serikat dalam proses pengadilan atas tuduhan yang mencakup penipuan kepada pemerintahan Amerika Serikat, internet, penipuan bank, dan pencurian identitas. Namun, Intervensi itu tidak berhenti pada tahun itu saja.

Pada tahun 2020, komunitas intelijen Amerika Serikat mengeluarkan laporan yang berisikan dugaan bahwa Rusia melanjutkan aksinya dengan kembali mencelupkan tangan mereka pada kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020. Kembali diduga membantu pasangan calon presiden Donald Trump dengan menyebarkan disinformasi besar-besaran yang berhasil ditargetkan, dan secara terbuka disetujui sekutu Trump. Dalam laporan tersebut juga tertulis bahwa Rusia diduga bertujuan tidak hanya untuk merugikan pencalonan Biden dan membantu Trump, namun juga berusaha untuk merusak “kepercayaan publik dalam proses pemilihan dan memperburuk perpecahan sosial politik di AS.” Namun respon Rusia masih tetap sama, membantah dugaan tersebut. Terlepas dari serangkaian bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh komunitas intelijen AS menunjukkan partisipasi Rusia dalam upaya-upaya intervensi kampanye hitam via media sosial, dan juga propaganda-propaganda media lainnya, saat ini, tidak ada bukti bahwa Rusia menggunakan metode lain digunakan di Amerika Serikat.

Namun, ada bukti bahwa Rusia telah menjadi ahli dalam seni membuat bot yang didedikasikan untuk menyebarkan informasi palsu. Dengan cara ini, campur tangan Rusia terus memicu ketegangan di antara orang Amerika, menambah ketidakpastian dan merusak kepercayaan publik dalam proses pemilu yang demokratis. Rusia sampai sekarang pun tidak dijatuhkan dakwa yang serius dan berat oleh Pemerintah AS. Dari semua peristiwa ini, timbullah sesuatu kekhawatiran yang kemudian membuat kita sebagai publik mempertanyakan bagaimana upaya Rusia melakukan intervensi tersebut.

Terlepas dari dugaan-dugaan yang memiliki pondasi yang kurang, terdapat juga dugaan yang terbukti benar adanya, dan dianggap berhasil mengacak kampanye tersebut, dan Rusia pun berhasil menghindari penalti atas itu semua. Rusia menggunakan propaganda *firehose of falsehood*, di mana sejumlah besar pesan disiarkan dengan cepat, berulang-ulang, dan terus menerus melalui berbagai saluran (seperti berita dan media sosial) tanpa memperhatikan kebenaran atau konsistensi. Teknik ini sudah dilakukan oleh Rusia sejak lama, tidak hanya pada pemilihan presiden AS saja namun agenda-agenda politik negara lain yang dianggap tidak bersahabat dengan kepentingan Rusia. Penelitian ini akan membahas dengan detail bagaimana upaya-upaya Rusia dalam mengintervensi agenda politik Amerika Serikat terkhususnya pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya Rusia dalam mengintervensi pemilihan Presiden Amerika Serikat melalui media sosial sebagai alat kampanye hitam pada tahun 2016 dan 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa bagaimana Rusia menggunakan media sosial sebagai alat kampanye hitam pemilihan presiden AS pada tahun 2016.
2. Menganalisa bagaimana Rusia menggunakan media sosial sebagai alat kampanye hitam pemilihan presiden AS pada tahun 2020.
3. Menganalisa bagaimana Rusia menggunakan propaganda *firehose of falsehood* dalam intervensi kampanye pemilihan presiden AS.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada upaya Rusia mengintervensi kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan 2020 dengan subjeknya yaitu Rusia dalam memperalat lembaga-lembaga seperti *Internet Research Agency* dan memanfaatkan fitur-fitur dan algoritma media sosial untuk memanipulasi dan menggiring opini khalayak massa melalui media sosial. Penelitian ini harus menegaskan kembali fokus pada perbedaan antara pemilihan presiden AS 2016 dan 2020 karena keduanya merupakan momen penting yang menunjukkan pola intervensi asing oleh Rusia dan dampaknya terhadap demokrasi AS. Membahas

kedua pemilu ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang bagaimana metode intervensi berkembang dan respons AS terhadap ancaman tersebut. Pemilu 2016 menunjukkan awal dari campur tangan Rusia dengan kampanye disinformasi dan peretasan, sementara pemilu 2020 menunjukkan kelanjutan dan adaptasi taktik tersebut meskipun ada upaya mitigasi. Menganalisis keduanya membantu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi integritas pemilu di masa depan.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Nainggolan dalam tulisannya mengatakan bahwa metode propaganda Rusia, yang dilakukan secara besar-besaran melalui kampanye kebohongan yang terus menerus dan berulang-ulang, dilakukan dengan cepat, ekstensif dan agresif melalui berbagai saluran komunikasi untuk memojokkan Hillary dan, sebaliknya, memoles citra Trump sebagai calon yang lebih layak, untuk mendukung dan dimenangkan oleh pemilih Amerika. Propaganda Dalam tulisan tersebut, Nainggolan juga menyampaikan bahwa *Firehose of Falsehood* ini digunakan untuk meniadakan informasi yang benar dan mengesampingkan realitas objektif untuk mempengaruhi pemilih yang rasional, terutama pemilih yang belum memutuskan, di negara target untuk memungkinkan kandidat yang mendapat dukungan dari negara asing untuk memenangkan pemilihan nasional mereka. Pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria yang dijelaskan oleh Paul dan Matthews dalam tulisannya yang membahas ciri-ciri dari propaganda tersebut yaitu tidak memiliki komitmen terhadap konsistensi, tidak memiliki komitmen terhadap realitas objektif,

propaganda yang cepat, berkelanjutan dan berulang, volume tinggi dan multi saluran. (Nainggolan 2020, 4-5)

Paul dan Matthews juga menjelaskan dalam tulisannya bahwa selama pemilihan presiden AS pada tahun 2016, akun-akun Facebook yang ditautkan ke Rusia memposting konten tentang masalah sosial yang memecah belah. Konten tidak memiliki fokus ideologis. Sebaliknya, strategi Rusia bertujuan untuk mendorong polarisasi lebih lanjut seputar isu-isu politik yang memanas: ras, imigrasi, agama, dan gender. Akun-akun tersebut mempromosikan konten menggunakan fitur iklan yang tersedia di Facebook dan media sosial lainnya kepada pengguna target mikro dengan keyakinan dan ketertarikan yang serupa. Konten ini mencapai 150 juta pengguna Facebook dan Instagram dengan biaya hanya \$100.000, menurut kesaksian kongres oleh Penasihat Umum Facebook pada bulan Oktober 2017. Hanya dengan 7 akun, Rusia dapat menjangkau sejumlah besar pengguna dengan biaya rendah, dan perusahaan teknologi lainnya bergantung pada kemampuan mereka untuk mengumpulkan data pribadi yang semakin canggih yang memungkinkan pengiklan menargetkan individu tertentu. Di tangan aktor jahat, data ini menjadi tambang pengaruh, penargetan politik, dan manipulasi. (Paul and Matthews 2016, 2-3)

Nainggolan juga mendukung pernyataan bahwa Rusia tidak terlibat langsung dalam intervensi ini melainkan organisasi-organisasi *state-sponsored* lah yang bergerak, karena apabila suatu negara melibatkan diri mereka secara gamblang akan membuat hal tersebut mudah diselidiki dan diungkap oleh pengadilan sehingga hasil pemilu dapat dibatalkan dan Presiden terpilih dapat digulingkan. Oleh karena itu, tentunya kegiatannya dilakukan melalui operasi

intelijen rahasia, sehingga harus dibongkar juga oleh operasi kontra intelijen AS. Namun pada akhirnya, operasi tersebut berhasil menguak keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kasus tersebut. *Hearing* di Kongres AS di bulan Oktober 2017 berhasil mengungkap upaya agen-agen Rusia membeli iklan di Facebook dan mempengaruhi 126 juta pengguna media sosial itu. (Paul and Matthews 2016)

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep *cyber war* milik Thomas Rid (2013). Dalam bukunya yang berjudul *Cyber War Will Not Take Place*, definisi Rid terhadap *cyber war* didasarkan pada pemahaman tentang konsep ‘perang’ yang berpusat pada negara, dengan menekankan pada definisi perang konvensional yang dijabarkan oleh Clausewitz. Berdasarkan definisi perang konvensional, *cyber war* merupakan aktivitas yang kasar, yakni dengan menggunakan kekuatan; instrumental, yakni bertujuan untuk memaksa musuh untuk mengubah sikapnya ataupun mengikuti keinginan dari suatu negara; dan memiliki tujuan politik. Hal ini membuat aktivitas-aktivitas yang selama ini dikategorikan sebagai *cyber war*, seperti sabotase dan spionase, tidak merepresentasikan ‘perang’ (Rid 2013, 4)

Menanggapi hal tersebut, Thomas Rid menyebutkan bahwa *cyber war* tidak harus selalu bersifat *violent* untuk dapat dikatakan sebagai efektif. Hal tersebut karena pada serangan siber yang tidak mematikan pun, hasil yang didapatkan terkadang lebih efektif dibandingkan dengan perang konvensional. Namun, Rid menjelaskan bahwa tujuan utama dari dilakukannya *cyber war* adalah untuk



menghindari atribusi, sehingga konflik dalam jaringan merupakan keputusan yang paling tepat untuk dilakukan karena dengan menggunakan jaringan digital, sulit untuk menentukan pelaku dari serangan siber tertentu (Rid 2013, 10)

Thomas Rid selanjutnya mendefinisikan *cyber war* sebagai aktivitas koersif yang melibatkan serangan terhadap jaringan komputer. Serangan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang ada dalam jaringan mengalami gangguan, terdegradasi, atau bahkan hilang. ‘Koersif’, dalam definisi tersebut, diartikan sebagai penggunaan kekuatan, melalui jaringan komputer, untuk mengubah atau mencapai *status quo* dalam politik (Rid 2013, 9). Dalam praktiknya, Rid membagi *cyber war* ke dalam tiga jenis aktivitas, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Sabotase

Sabotase adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk melemahkan atau melumpuhkan sistem ekonomi atau militer aktor lain. Sabotase merupakan tindakan *cyber war* dengan memanfaatkan instrumen perangkat lunak ataupun serangan siber. Semakin tinggi tingkat kemajuan teknologi dan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi, semakin tinggi pula potensi *cyber war* dilakukan dalam bentuk sabotase. Sabotase umumnya tidak dilakukan dalam skala besar dan menghindari identifikasi sebaik mungkin agar dapat merusak sistem teknologi target (Rid 2013, 56).

2. Spionase

Spionase dalam lingkup siber merupakan upaya untuk mempenetrasi jaringan ataupun sistem komputer aktor lain dengan tujuan untuk mencuri informasi rahasia dan sensitif. Dengan kata lain, spionase merupakan aktivitas intelijen dengan memotong komunikasi antar komputer dalam

jaringan yang sama, atau dengan memasuki jaringan komputer tersebut demi mendapatkan data. Berbeda dengan sabotase yang bersifat instrumental, spionase tidak bertujuan untuk mencapai tujuan khusus, melainkan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk merancang instrumen atau kebijakan yang lebih konkret (Rid 2013, 82).

### 3. Subversi

Subversi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi otoritas yang dimiliki oleh tatanan yang sudah ada. Aktor yang melakukan subversi umumnya memiliki pandangan bahwa suatu tatanan perlu diubah untuk keberlangsungan sistem yang lebih baik. Dengan perkembangan teknologi, aktivitas subversi pun semakin banyak dilakukan karena hampir semua orang dapat mengirim dan menerima informasi tanpa di luar kendali dari tatanan itu sendiri, yang selanjutnya mempengaruhi legitimasi dari tatanan (Rid 2013, 114).

Pemilihan variabel sabotase, spionase, dan subversi dalam penelitian ini didasarkan pada konsep cyber war yang dikemukakan oleh Thomas Rid dalam bukunya *Cyber War Will Not Take Place*. Rid mendefinisikan cyber war sebagai aktivitas koersif yang melibatkan serangan terhadap jaringan komputer dengan tujuan mengubah atau mencapai status quo politik. Aktivitas ini tidak selalu bersifat kasar atau mematikan, tetapi tetap efektif dalam mencapai tujuan politik. Rid menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari cyber war adalah untuk menghindari atribusi, sehingga penggunaan jaringan digital menjadi keputusan yang tepat karena sulit menentukan pelaku serangan siber.

Fokus pada ketiga variabel ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan spesifik terhadap pola dan dampak serangan siber terhadap politik dan keamanan nasional. Meskipun buku Rid juga mencakup aspek lain seperti propaganda dan manipulasi opini publik, pemilihan untuk fokus pada sabotase, spionase, dan subversi membantu menjaga konsistensi analitis dan memberikan kerangka analitis yang jelas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana serangan siber dapat memengaruhi politik dan keamanan nasional secara lebih komprehensif.

### **1.7 Argumen Sementara**

Upaya Rusia dalam mengintervensi pemilihan Presiden Amerika Serikat melalui internet sebagai alat kampanye hitam pada tahun 2016 dan 2020 adalah melalui pendekatan sabotase, spionase, dan subversi. *Pertama*, sabotase yang dilakukan Rusia terhadap sistem pemilihan untuk mendukung salah satu calon presiden, yaitu Donald Trump. *Kedua*, spionase yang dilakukan terhadap kandidat presidensial Amerika Serikat. *Ketiga*, Rusia melakukan subversi dengan memanfaatkan berbagai aktor untuk mengurangi legitimasi Amerika Serikat dan mengubah tatanan yang dinilai tidak pro-Rusia, melalui penyebaran berita kontroversial dan hoaks untuk memanipulasi pilihan publik.

### **1.8 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Kualitatif, karena penulis mengambil data-data yang bersifat literatur.

#### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis Penelitian dalam penelitian dengan judul “Upaya Rusia dalam Mengintervensi Pemilihan Presiden Amerika Serikat Menggunakan Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Hitam Pada Tahun 2016 dan 2020” ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang digunakan oleh peneliti banyak berupa literatur.

#### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini difokuskan kepada Rusia dengan objek Media Sosial selaku wadah digunakan untuk memanipulasi kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan 2020.

#### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam tulisan ini menggunakan literatur secara tidak langsung seperti jurnal, buku, situs resmi, surat kabar, dan laporan resmi organisasi dan pemerintah, dan berita-berita terkini yang membahas kasus yang diangkat oleh penulis.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian berupa mengumpulkan data. Data-data yang dikumpulkan juga akan dikaji terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis, dan mengaitkan setiap subjek dan objek yang berkaitan dalam kasus yang diteliti oleh penulis. Semua data yang digunakan dan ditulis dalam penelitian juga akan diteliti lebih dalam untuk dipastikan kredibilitas dan validitas data tersebut.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Bab I - Kerangka pada Bab I membahas poin-poin mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian.

Bab II - Bab II membahas tentang politik luar negeri Rusia terhadap hubungan luar negeri dalam lingkup multilateral, regional, dan bilateral yang menjadi dasar bagi intervensi Rusia. Selanjutnya, dibahas tentang kondisi pemilihan presidensial Amerika Serikat tahun 2016 dan 2020.

Bab III – Bab III membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Rusia dalam mengintervensi pemilihan presidensial Amerika Serikat tahun 2016 dan 2020, beserta analisis dengan menggunakan konsep *cyber war*.

Bab IV - Di dalam bab ini membahas tentang hasil kesimpulan yang sudah dibahas dari masing-masing bab.

## **BAB 2**

### **KONTEKS POLITIK LUAR NEGERI RUSIA**

#### **2.1 Pentingnya Amerika Serikat untuk Rusia**

Hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia telah lama menjadi titik fokus dalam politik global, ditandai dengan periode kerja sama dan ketegangan yang berfluktuasi. Data jajak pendapat terbaru dari Chicago Council Survey 2016 dan Levada Analytical Center di Rusia mengungkapkan perspektif bernuansa tentang bagaimana warga kedua negara memandang hubungan bilateral mereka dan pengaruh satu sama lain di panggung dunia. Orang Amerika, meskipun menganggap tindakan Rusia sebagai upaya untuk menahan kekuatan AS, umumnya lebih menyukai kerja sama dan keterlibatan daripada penahanan. Sentimen ini signifikan mengingat meningkatnya ketegangan antara kedua negara, ditandai dengan putusnya kerja sama di Suriah, perselisihan tentang perjanjian pengendalian senjata, dan tuduhan campur tangan cyber Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016. Insiden-insiden ini telah berkontribusi pada peningkatan ketegangan bilateral yang signifikan, mengingatkan pada era Perang Dingin.

Sebaliknya, publik Rusia memiliki rasa tidak aman mengenai kekuatan dan pengaruh AS, lebih memilih negara mereka untuk bekerja membatasi pengaruh Amerika secara internasional. Jajak pendapat Levada Maret 2016 menggarisbawahi sentimen ini, menunjukkan bahwa 76 persen orang Rusia tidak menyetujui pendekatan AS terhadap pemecahan masalah internasional. Pandangan kritis tentang keterlibatan AS di luar negeri ini sejalan dengan perspektif Rusia yang lebih luas yang menekankan mengandung pengaruh AS. Menurut jajak pendapat yang

sama, tujuh dari sepuluh orang Rusia percaya negara mereka harus fokus pada pembatasan kekuatan AS, sementara hanya sepertiga yang mendukung kerja sama dengan Amerika States. In sangat kontras, publik Amerika tetap cenderung berkolaborasi dengan Rusia. Meskipun ada kekhawatiran tentang peran internasional Rusia, dengan Survei Dewan Chicago 2015 menunjukkan bahwa hanya 43 persen orang Amerika memandang kepemimpinan Rusia yang kuat sebagai hal yang diinginkan dan hanya 27 persen yang yakin pada kemampuan Rusia untuk menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab, sebagian besar masih Mendukung keterlibatan atas penahanan. Perbedaan ini menyoroti perbedaan mendasar dalam bagaimana masing-masing negara memandang ambisi dan tindakan satu sama lain.

Pada 2016, orang Amerika memberi peringkat Rusia 6,2 dari 10 dalam hal pengaruh global, menempatkannya di belakang AS, Cina, dan Uni Eropa. Peringkat ini tetap stabil selama dekade terakhir, mencerminkan pandangan yang konsisten tentang posisi global Rusia. Sementara itu, mayoritas orang Rusia melihat ambisi AS untuk melakukan kontrol atas negara lain sebagai ancaman kritis bagi bangsa mereka, semakin memicu preferensi mereka untuk membatasi pengaruh Amerika. Interaksi persepsi ini menggarisbawahi kompleksitas hubungan AS-Rusia. Sementara orang Amerika condong ke arah kerja sama, melihatnya sebagai jalan untuk mengurangi konflik dan mendorong stabilitas, Rusia lebih cenderung mengimbangi kekuatan AS untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Dikotomi ini menyoroti dinamika geopolitik yang lebih luas dan tantangan dalam

menjembatani kesenjangan antara perspektif yang berbeda ini. Kesimpulannya, data jajak pendapat dari kedua negara menerangi pandangan yang kontras tentang hubungan AS-Rusia. Preferensi orang Amerika untuk keterlibatan dan kecenderungan Rusia terhadap penahanan mencerminkan faktor sejarah, politik, dan sosial yang mendalam. Memahami perspektif ini sangat penting bagi pembuat kebijakan yang ingin menavigasi lanskap rumit hubungan AS-Rusia dan menumbuhkan lingkungan internasional yang lebih stabil dan kooperatif.

## **2.2 Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2016**

Pemilihan presiden AS tahun 2016 dilaksanakan pada 8 November 2016 dengan kontestasi utama terjadi antara Donald Trump, yang berasal dari Partai Republik, dan Hillary Clinton, yang berasal dari Partai Demokrat. Hasil pemilihan presidensial menunjukkan Clinton mendapatkan 2,8 juta suara populer lebih banyak dibanding Trump. Namun, Trump mendapatkan 304 suara elektoral, sedangkan Clinton hanya mendapatkan 227 suara elektoral, membuat Trump muncul menjadi pemenang pemilihan presidensial AS tahun 2016. Kemenangan Trump disebut sebagai kekalahan terbesar dalam pemilihan presidensial AS karena Trump sama sekali tidak memiliki latar belakang karir politik, sedangkan Clinton merupakan mantan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Barack Obama dan merupakan istri dari mantan presiden AS, Bill Clinton (Beckwith 2023).

Kampanye presidensial di antara kedua kandidat diawali dengan pemilihan posisi yang bertolak belakang pada isu-isu utama yang menjadi perhatian publik



AS. Namun, dalam konteks intervensi Rusia terhadap pemilihan presidensial AS tahun 2016, penjelasan terkait kampanye kandidat presiden AS akan difokuskan pada kampanye kebijakan luar negeri dan bagaimana pengaruhnya terhadap Rusia.

### *2.2.1 Kebijakan Luar Negeri Hillary Clinton*

Kampanye Hillary Clinton menekankan pada upayanya untuk membuat AS menjadi negara yang utuh, yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi di AS. Clinton dinilai akan melanjutkan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh pemerintahan Barack Obama, termasuk di antaranya adalah kebijakan luar negeri AS terhadap Rusia. Rusia memandang bahwa Clinton akan mengembangkan kebijakan yang anti-Rusia sebagai hasil dari pandangan tradisional AS yang melihat Rusia sebagai lawan (Careaga and Kornilov 2020).

Clinton disebut-sebut memiliki kebijakan yang keras sejak karirnya sebagai menteri luar negeri. Sebagai contoh, Clinton mendukung invasi AS di Irak dan mengadvokasi serangan udara AS di Libya. Ia juga mendorong presiden untuk memperkuat peran AS dalam memerangi ISIS di Suriah serta meningkatkan presensi militer AS di Afghanistan. Secara garis besar, kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Clinton fokus pada representasi kapabilitas militer yang kuat di negara lain (Zurcher 2016). Clinton juga memberikan kritik yang keras terhadap kebijakan luar negeri Rusia, misalnya pembentukan Eurasia Economic Union oleh Rusia yang disebut oleh Clinton bertujuan untuk men-Sovietisasi kawasan kembali

seperti sebelumnya (McFaul 2016). Di samping itu, Clinton juga menyebutkan dugaan kecurangan dalam pemilihan parlemen Rusia yang dilihat Putin sebagai upaya Clinton untuk mendorong munculnya demonstrasi di Rusia.

Dalam hal ini, Clinton menyebut bahwa Putin telah melakukan manipulasi terhadap hasil pemungutan suara dan melakukan kekerasan sistemik terhadap publik. Clinton juga menyatakan bahwa kembalinya Putin ke dalam pemerintahan Rusia akan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan luar negeri AS, khususnya dalam upaya AS menyebarkan demokrasi di Eropa Timur dan keterlibatan AS dalam konflik Suriah. Menanggapi hal tersebut, Putin secara terbuka mengeluarkan kebijakan untuk menentang AS, misalnya dengan mengusir U.S. Agency for International Development dari Rusia dengan alasan bahwa badan tersebut mengganggu hubungan domestik di Rusia. Putin juga berkali-kali menghambat kebijakan AS dalam konflik Suriah dengan tujuan untuk mempertahankan pemerintahan Assad, yang merupakan aliansi tradisional Rusia (Warrick and DeYoung 2016).

Sejak Clinton menjabat sebagai menteri luar negeri pun, Clinton telah memberikan beberapa saran yang keras terhadap Presiden Obama terkait hubungan bilateral antara AS dan Rusia. Dalam memoar yang ditulis oleh Clinton pada tahun 2014, Clinton menyebutkan “jangan terlihat ingin bekerja sama dengan Rusia” dan “jangan menyanjung Putin dalam aktivitas resmi; tolak undangan Putin dalam pertemuan presidensial”, yang menunjukkan pandangan pribadi Clinton terhadap

Putin, yang selanjutnya akan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS jika Clinton terpilih menjadi presiden (Warrick and DeYoung 2016).

Pada Oktober 2016, Clinton menyatakan bahwa jika ia berhasil terpilih menjadi presiden AS yang selanjutnya, Clinton akan mengubah kebijakan luar negeri AS menjadi lebih tegas terhadap Rusia. Bahkan, Clinton menyatakan bahwa ia akan menjadi presiden dengan hubungan paling tidak akur dengan Rusia dalam tiga dekade terakhir, terlebih karena ketidaksukaan personalnya terhadap Presiden Vladimir Putin. Clinton juga menyebut Putin sebagai musuh utama dari AS yang meretas kantor pusat kampanye Clinton di Brooklyn, melakukan pengeboman terhadap penduduk sipil Suriah, serta memberikan ancaman bagi Ukraina dan aliansi-aliansi AS lainnya di Eropa (Sanger 2016).

Berdasarkan karakter politik Clinton, Clinton akan memperkuat relasi AS dengan aliansinya dan tidak akan mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia. Posisi tersebut membuat Rusia sulit untuk meningkatkan pengaruhnya dalam sistem internasional (McFaul 2016). Diperkirakan, Clinton juga telah merumuskan rancangan kebijakan yang akan diterapkannya terhadap Putin jika ia menjadi presiden AS, seperti sanksi, isolasi diplomatik, bahkan kecaman internasional (Sanger 2016). Berdasarkan kondisi tersebut, terpilihnya Hillary Clinton sebagai presiden AS dinilai akan membawa dampak buruk bagi Rusia.

### 2.2.2 Kebijakan Luar Negeri Donald Trump

Donald Trump memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung bertolak belakang dengan Clinton ataupun kebijakan luar negeri tradisional AS. Trump mengeluarkan kritik terhadap invasi AS di Irak dan aktivitas militer AS lainnya di Timur Tengah. Trump juga menyatakan akan menjalin relasi yang lebih dekat dengan Rusia. Di samping itu, Trump menyebut bahwa aliansi-aliansi AS di Eropa dan Asia harus berhenti menggantungkan diri pada AS di bidang pertahanan, dan mulai mengembangkan kapabilitas militer masing-masing. Hal itu agar AS dapat memfokuskan kebijakan luar negerinya pada kepentingan nasional AS. Namun, dalam hal perlawanan terhadap ISIS, Trump menunjukkan posisi yang keras seperti Clinton, dimana ia menyatakan bahwa pemerintahan Obama tidak cukup tegas dalam upaya mengatasi penyebaran gerakan radikal Islam. Pernyataan Trump tentang isu negara Islam justru menunjukkan kebijakannya yang diskriminatif dan anti-Islam (Zurcher 2016).

Sebagian besar kebijakan Trump lainnya juga cenderung merusak kredibilitas AS sebagai pemimpin global, yang selanjutnya berdampak positif pada Rusia yang berkeinginan untuk kembali muncul sebagai *great power*. Sebagai contoh, Trump meminta negara-negara anggota NATO untuk membayar AS atas perlindungan yang diberikan oleh AS melalui NATO. Hal tersebut membuat aliansi AS, khususnya negara-negara yang berada di Eropa Timur, khawatir akan komitmen AS untuk memberikan bantuan militer jika terdapat serangan dari Rusia. Pernyataan Trump tersebut juga bertentangan dengan regulasi yang dimiliki oleh

NATO, yang selanjutnya memicu respons negatif dari NATO (Morello and Taylor 2016). Kecenderungan kebijakan Trump yang isolasionis dan berusaha untuk menarik AS dari kerja sama dengan negara lain memberi kesempatan bagi Rusia untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya dengan lebih bebas.

Secara terbuka, Putin menyatakan dukungannya terhadap Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 karena anggapan bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Trump akan lebih menguntungkan bagi Rusia. Putin juga menyatakan bahwa dukungannya tersebut didasari oleh pernyataan Trump bahwa ia akan mengupayakan normalisasi hubungan antara Rusia dan AS (Murray 2018). Selain itu, salah satu kebijakan Trump yang paling signifikan bagi Rusia adalah pengajuan pengakuan Krimea sebagai wilayah bagian dari Rusia. Pengajuan tersebut ditolak oleh Obama, yang saat itu masih menjabat menjadi presiden AS, dan hampir seluruh anggota Kongres. Dalam lingkup internasional pun, hanya beberapa negara yang mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia, sehingga validasi dari AS akan memberikan dampak besar bagi posisi Rusia dalam konfliknya dengan Krimea (McFaul 2016).

### **2.3 Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020**

Pemilihan presidensial AS tahun 2020 dilaksanakan pada 3 November 2020, dengan kandidat utama adalah Joe Biden, yang berasal dari Partai Demokrat, dan Donald Trump, yang merupakan petahana dan berasal dari Partai Republik. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa Biden mendapatkan 81 juta suara populer

lebih banyak dibandingkan dengan Trump, dan 74 suara elektoral lebih banyak (Britannica 2023), sehingga Biden berhasil memenangkan pemilihan presidensial tahun 2020 dan ditetapkan sebagai presiden AS ke-47 menggantikan Trump.

Secara garis besar, kampanye presidensial yang dilakukan oleh Biden dan Trump memiliki perbedaan yang signifikan. Biden berupaya mempresentasikan kemampuannya untuk berempati terhadap masyarakat dan menyatukan publik AS yang sebelumnya terpecah-belah secara politik sebagai akibat dari karakter politik Trump diskriminatif terhadap ras tertentu. Di sisi lain, kampanye Trump justru menunjukkan kegagalannya dalam mengatasi berbagai permasalahan domestik, khususnya isu pandemi Covid-19, salah satunya ditandai dengan kampanye skala besar yang dilakukan oleh Trump, dimana sebagian besar pendukungnya yang mengikuti kampanye tersebut tidak menerapkan pembatasan sosial dan tidak menggunakan masker. Tidak lama, Trump pun diketahui menjalani karantina sebagai akibat dari Covid-19, yang selanjutnya mengurangi kredibilitasnya, secara spesifik pada isu kesehatan publik (Britannica 2023).

Hasil pemilihan yang menunjukkan kemenangan Biden mendapatkan respons negatif dari Trump. Trump, didukung oleh Partai Republik dan media sayap-kanan, terus-menerus menunjukkan penolakannya dengan menyebut tindak kecurangan dalam pemilihan presidensial tanpa bukti yang konkret. Ia juga mengajukan tuntutan hukum terkait hasil pemilihan presidensial di negara bagian tempat ia mengalami kekalahan, yang direspon dengan penolakan dari pengadilan, bahkan Mahkamah Agung AS. Tidak hanya Trump, pendukung Trump pun

melakukan demonstrasi di Capitol yang berujung pada konflik kekerasan antara aparat kepolisian dan demonstran. Pada Januari 2021, Trump terbukti terlibat dalam upaya pengumpulan massa demonstrasi yang menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat AS memutuskan untuk melengserkan Trump dari posisinya sebagai presiden, dan secara resmi mengangkat Joe Biden sebagai presiden AS (Britannica 2023).

Pada pemilihan presidensial AS tahun 2020, kebijakan luar negeri Trump terhadap Rusia masih cenderung sama seperti sebelumnya. Namun, dalam hal ini, perlu dilihat perbedaan pada kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Joe Biden. Biden secara garis besar melanjutkan kebijakan luar negeri yang dibawa oleh Partai Demokrat, khususnya terkait posisinya terhadap Rusia. Biden menyebut Putin sebagai ancaman terbesar bagi AS, walaupun ia juga menyebut bahwa Tiongkok merupakan kompetitor utama untuk AS. Dalam hal ini, Biden menyebutkan bahwa Rusia pada dasarnya merupakan negara yang mengalami keunduran, baik di bidang ekonomi maupun militer. Namun, kebijakan luar negeri Rusia terfokus pada upaya untuk melemahkan kondisi internal negara-negara Barat, menggagalkan implementasi institusi internasional seperti NATO dan Uni Eropa, serta mengganggu tatanan dunia yang liberal. Biden memandang Rusia sebagai negara yang agresif dan bertujuan untuk memperoleh kembali kekuasaannya seperti pada masa Perang Dingin, dimana saat ini tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada negara-negara eks-Soviet saja, tetapi dalam lingkup internasional, untuk bersaing dengan pengaruh yang dimiliki AS (Trenin 2020).

Pada beberapa isu, Biden memiliki posisi yang keras terhadap Rusia, khususnya di negara-negara eks-Soviet. Biden merupakan pengawas dalam kebijakan luar negeri Obama di Ukraina. Biden juga menolak kebijakan Rusia terhadap Minsk dan Nagorno-Karabakh. Kondisi tersebut membuat Biden menjadi ancaman bagi Rusia, pada skenario terpilihnya Biden sebagai presiden. Terlebih, Biden juga merencanakan pembangunan dan penyebaran sistem rudal AS di Eropa yang ditujukan langsung ke pusat komando dan aset strategis Rusia pada jarak dekat, memberikan ancaman keamanan bagi Rusia (Trenin 2020).

Namun, berbeda dengan Clinton, kebijakan Biden yang tegas terhadap Rusia cenderung difokuskan pada upaya untuk membangun kesempatan bagi kerja sama di antara Rusia dan AS. Biden berpendapat bahwa mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang terlalu tegas terhadap Rusia justru mendorong Rusia untuk melakukan perlawanan dengan lebih keras, yang kemudian dapat mengancam keamanan nasional AS. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Biden terhadap Rusia menitikberatkan pada koordinasi badan pemerintah AS dalam segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan Rusia dan meningkatkan kerja sama dengan aliansi AS, tetapi tetap mempertahankan tatanan hukum yang berlaku, dimana Rusia harus dihukum atas tindakannya yang melanggar hukum internasional. Biden juga berupaya untuk mengubah sudut pandang persaingan yang ada di antara Rusia dan AS dengan memproyeksikan persaingan antara oligarki Rusia dengan masyarakat sipil Rusia yang didukung oleh AS. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh AS adalah dengan mengekspos korupsi pemerintah



Rusia yang kemudian berdampak pada rusaknya citra Kremlin di mata masyarakat sipil Rusia (Trenin 2020).

Analisis politik internasional menyatakan bahwa terpilihnya Biden sebagai presiden AS akan meningkatkan tensi antara AS dan Rusia. Hal tersebut karena terpilihnya Biden sebagai presiden AS akan memperbaiki hubungan transatlantik antara AS dan Eropa, serta memperkuat komitmen AS dalam NATO. Akibatnya, kondisi itu dapat menjadi ancaman bagi Rusia, didukung oleh rasa tidak percaya antara Rusia terhadap perwakilan Partai Demokrat AS, salah satunya Biden. Sejak Biden menjabat menjadi wakil presiden dari pemerintahan Barack Obama, Biden memiliki posisi yang cenderung anti-Rusia, salah satunya ditandai dengan dorongan untuk menerapkan sanksi terhadap Rusia terkait krisis Ukraina pada tahun 2014. Terpilihnya Biden menjadi presiden AS dipastikan akan menambah sanksi yang diterima oleh Rusia, terlebih karena adanya dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presidensial AS tahun 2020 (Ellyatt 2020).

Kemungkinan keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden di AS dapat dilihat dari sudut pandang realisme yang menekankan pada keinginan negara untuk memperkuat kekuasaannya dalam sistem internasional. Dalam hal ini, Rusia berupaya untuk meningkatkan kekuasaan relatifnya terhadap AS demi memperkuat posisinya dalam sistem internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden AS dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional, yang salah satunya diwujudkan dengan cara mendukung kandidat Partai Republik dalam pemilihan presiden AS (Careaga and Kornilov

2020). Hal tersebut juga didukung oleh kebijakan luar negeri Trump yang cenderung ramah terhadap Rusia, berbeda dengan kebijakan luar negeri Clinton ataupun Biden. Tanpa melihat alasan itupun, ketidaklancaran dalam proses pemilihan presidensial AS juga membawa dampak positif bagi Rusia, karena kondisi tersebut akan merusak kredibilitas demokrasi yang menjadi salah satu nilai utama yang dibawa oleh AS, serta merusak citra pemimpin yang dimiliki oleh AS. Oleh karena itu, intervensi Rusia dalam pemilihan presidensial AS cenderung dilakukan dengan memberi dukungan pada kandidat yang dinilai *less evil*.

#### **2.4 Tujuan Intervensi Rusia Terhadap Amerika Serikat**

Intervensi Rusia dalam pemilihan AS, merupakan bentuk politik global yang mempunyai tujuan untuk kepentingan negaranya. Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf. Motivasi di balik intervensi ini beragam, dengan fokus pada mengganggu cara hidup Amerika, menabur perselisihan publik, merusak lembaga-lembaga demokrasi, dan memperburuk polarisasi politik. Tidak seperti China, yang berusaha melemahkan ekonomi AS dan melampauinya di panggung global, tujuan Rusia lebih subversif dan psikologis. Seperti yang dijelaskan Wolf, tujuan utama Rusia adalah untuk mengganggu dan merusak cara hidup Amerika. Strategi ini melibatkan menciptakan kekacauan dan ketidakpastian dalam struktur sosial-politik AS, sehingga lebih sulit bagi bangsa untuk berfungsi secara kohesif dan percaya diri di panggung dunia. Dengan menumbuhkan lingkungan kebingungan dan ketidakstabilan, Rusia berharap untuk mengikis prinsip-prinsip yang menopang masyarakat Amerika.

Elemen penting dari pendekatan Rusia adalah menabur perselisihan publik. Taktik ini terutama terbukti dalam pemilihan presiden 2016 dan diperkirakan akan digunakan lagi dalam pemilihan 2020. Dengan mengeksploitasi celah sosial yang ada dan memperkuat isu-isu yang memecah belah, Rusia berusaha untuk memperdalam perpecahan dalam masyarakat Amerika. Metode interferensi ini sangat berbahaya karena memanfaatkan kekuatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang salah dan disinformasi, menciptakan wacana publik yang retak di mana konsensus menjadi semakin sulit dicapai.

Selain itu, campur tangan Rusia bertujuan untuk merusak lembaga-lembaga demokrasi AS. Dengan menyerang proses pemilu, Rusia berusaha mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas dan legitimasi lembaga-lembaga ini. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan skeptisisme dan sinisme di antara warga Amerika mengenai proses demokrasi mereka sendiri, yang menyebabkan penurunan kepercayaan dan partisipasi pemilih. Erosi kepercayaan ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang, melemahkan fondasi demokrasi dan membuatnya lebih rentan terhadap ancaman internal dan eksternal lebih lanjut.

Selain tujuan strategis ini, intervensi Rusia memperburuk polarisasi politik. AS telah mengalami perpecahan politik yang meningkat, dan upaya campur tangan Rusia dirancang untuk mengeksploitasi dan memperdalam perpecahan ini. Dengan menyebarkan konten polarisasi dan retorika yang menghasut, Rusia bertujuan untuk memperkuat kubu politik yang berlawanan lebih jauh, membuat dialog dan kerja sama bipartisan semakin sulit dipahami. Polarisasi yang meningkat ini tidak hanya melumpuhkan proses legislatif tetapi juga menghambat kemampuan bangsa untuk mengatasi masalah-masalah kritis secara efektif. Pernyataan Wolf menyoroti

langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Homeland Security dan badan-badan federal lainnya untuk melawan ancaman ini. Langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan, termasuk penggunaan mesin pemungutan suara yang menghasilkan kertas suara, dirancang untuk menjaga integritas proses pemilihan. Langkah-langkah ini sangat penting dalam memastikan bahwa pejabat negara bagian dan lokal diperlengkapi dengan baik untuk memerangi potensi gangguan. Intervensi Rusia dalam pemilihan AS melayani berbagai tujuan, semuanya diarahkan untuk mendestabilisasi bangsa dari dalam. Dengan mengganggu cara hidup Amerika, menabur perselisihan publik, merusak lembaga-lembaga demokrasi, dan memperburuk polarisasi politik, Rusia bertujuan untuk melemahkan AS pada tingkat fundamental. Mengenali dan melawan ancaman ini sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi Amerika dan memastikan bangsa dari dalam. Dengan mengganggu cara hidup Amerika, menabur perselisihan publik, merusak lembaga-lembaga demokrasi, dan memperburuk polarisasi politik, Rusia bertujuan untuk melemahkan AS pada tingkat fundamental. Mengenali dan melawan ancaman ini sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi Amerika dan memastikan ketahanan bangsa dalam menghadapi campur tangan asing.

#### *2.4.1 Politik Luar Negeri Rusia*

Dalam lingkup bilateral, politik luar negeri Rusia sebagian besar dipengaruhi oleh hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat, yang selanjutnya juga berdampak pada bagaimana Rusia memandang politik luar negerinya dalam lingkup regional dan multilateral. Rusia selalu memandang dirinya sebagai kekuatan global dan menganggap bahwa negaranya mengemban tanggung jawab dan posisi yang setara dengan AS dalam sistem internasional.

Salah satu konflik besar yang paling mempengaruhi hubungan bilateral antara Rusia dan AS adalah kemungkinan keterlibatan Rusia dalam pemilihan presidensial AS tahun 2016 melalui intervensi di ruang siber. AS menyebutkan bahwa Rusia melakukan sabotase dengan tujuan untuk memperparah polarisasi politik yang ada dalam masyarakat AS, memunculkan keraguan akan legitimasi demokrasi AS, dan memenangkan Donald Trump sebagai presiden AS. Gangguan yang dilakukan oleh Rusia tersebut diketahui juga terjadi pada pemilihan presidensial AS tahun 2020 (Stent 2020).

Hubungan bilateral yang tidak harmonis antara Rusia dan AS menjadi salah satu alasan dari intervensi Rusia dalam pemilihan presidensial AS. Persaingan yang terus-menerus terjadi di antara dua negara membuat Rusia dan AS memiliki kebijakan luar negeri yang keras terhadap satu sama lain dan berupaya untuk mempengaruhi kondisi domestik masing-masing. Walaupun tidak, kebijakan luar negeri masing-masing negara dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang dimiliki oleh negara lain. Pada konteks Rusia, intervensi dilakukan untuk mengurangi kredibilitas kepemimpinan AS dan mendukung presiden yang kebijakan luar negerinya tidak bertolak belakang dengan kepentingan Rusia.

### **BAB 3**

## **INTERVENSI RUSIA DALAM PEMILIHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016 DAN 2020**

Pemilihan presidensial Amerika Serikat Tahun 2016 dan 2020 mengalami beberapa gangguan dalam lingkup siber yang diperkirakan dilakukan oleh Rusia. Intervensi Rusia dalam pemilihan tersebut dapat dilihat sebagai tindakan *cyber war* yang bertujuan untuk memberikan tindakan koersif terhadap lawan, tetapi juga menghindari atribusi yang mungkin didapatkan dari adanya konflik fisik secara terbuka. Oleh karena itu, *cyber war* merupakan tindakan yang paling tepat karena lebih mudah bagi negara untuk menghindari atribusi dari negara lain. Hal itu pula yang dilakukan oleh Rusia, dimana Rusia diduga melakukan intervensi terhadap proses pemilihan presidensial Amerika Serikat, tetapi menyangkal keterlibatannya karena tidak adanya bukti yang bisa diberikan oleh Amerika Serikat atas tuduhan tersebut.

Sabotase dilakukan dengan cara meretas surel dari staf kampanye Partai Demokrat untuk memperoleh informasi yang jika disebar, dinilai dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan Rusia. Aktivitas ini berkaitan pula dengan spionase, dimana Rusia berupaya untuk memasuki akun pribadi milik staf ataupun kandidat dari Partai Demokrat untuk memperoleh informasi rahasia. Sabotase juga dilakukan dengan meretas situs-situs yang berkaitan dengan sistem pemilihan Amerika Serikat dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Amerika Serikat. Di sisi lain, aktivitas subversi dilakukan dengan cara menyebarkan narasi yang

mempengaruhi citra dari kandidat tertentu sehingga publik ragu untuk menetapkan pilihannya pada kandidat tersebut. Pelaksanaan ketiga aktivitas itu memiliki satu tujuan utama, yakni mengganggu sistem demokrasi Amerika Serikat, yang selanjutnya berpengaruh terhadap citra Amerika Serikat sebagai hegemon global.

### **3.1 Sabotase**

Sabotase merupakan aktivitas *cyber war* yang dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan sistem jaringan dari target, baik dengan cara melakukan serangan siber ataupun dengan memanfaatkan perangkat lunak (Rid 2013, 56). Berkaitan dengan intervensi Rusia dalam pemilihan presidensial Amerika Serikat, sabotase dilakukan dengan cara meretas situs ataupun surel dari pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi sistem ataupun mencuri data pribadi yang dinilai berguna bagi kepentingan Rusia. Selain itu, sabotase juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa sistem pemilihan yang digunakan di Amerika Serikat tidak cukup baik.

Sebagian besar intervensi Rusia di Amerika Serikat dilakukan oleh GRU. GRU sendiri merupakan agensi intelijen militer yang dikelola oleh pasukan bersenjata dari Rusia dan bertanggung jawab terhadap Menteri Pertahanan. Keterlibatan GRU dalam intervensi pemilihan presidensial Amerika Serikat menunjukkan bahwa isu pemilihan presidensial Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap kebijakan luar negeri Rusia karena GRU dirancang untuk melakukan aktivitas intelijen yang krusial dan beresiko (Hodge 2020). Salah satu intervensi yang dilakukan GRU terhadap pemilihan presidensial Amerika Serikat

adalah upaya peretasan terhadap Partai Demokrat, khususnya staf-staf yang berkaitan dengan Hillary Clinton, pada pemilihan tahun 2016.

Informasi terkait keterlibatan GRU dipublikasikan oleh penasihat khusus Robert Mueller pada pertengahan tahun 2018. Mueller menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua belas staf GRU yang diduga terlibat dalam upaya sabotase pemilihan presidensial Amerika Serikat pada tahun 2016. Mueller menyebut bahwa staf intelijen Rusia berupaya untuk meretas jaringan komputer dari Hillary Clinton dan staf kampanyenya, baik dari Komite Nasional Demokrat ataupun Komite Kampanye Kongresional Demokrat. Peretasan tersebut dilakukan sebagai bentuk spionase untuk memperoleh informasi-informasi rahasia, yang selanjutnya akan disebarluaskan dengan nama “DCLeaks” dan “Guccifer 2.0” (Ward 2018).

Dalam upaya peretasan tersebut, Mueller menyebut bahwa terdapat setidaknya 76 alamat surel dari staf kampanye Clinton yang berhasil diretas oleh GRU. Aleksey Lukashev, salah satu staf yang terlibat dalam peretasan tersebut, menyatakan bahwa ia menggunakan berbagai persona palsu di media sosial untuk menyebarkan tautan *spearphishing*, yang mana ketika tautan tersebut dikunjungi, peretas akan mendapatkan data yang digunakan untuk *log in* ke alamat surel dari pemilik. Di sisi lain, Nikolay Kozachek, staf lain yang juga terlibat dalam peretasan, menyatakan bahwa ia menciptakan *malware* X-Agent yang digunakan untuk meretas jaringan DNC dan DCCC pada April 2016. Dalam *malware* tersebut, peretas memasukkan program *keystroke loggers*, yang membuat peretas dapat melihat aktivitas yang dilakukan dari komputer korban (Nakashima and Harris 2018). Dengan berhasil meretas komputer ataupun jaringan yang digunakan oleh



Partai Demokrat, GRU pun dapat melakukan spionase untuk mengambil informasi yang menguntungkan bagi Rusia.

Pada pemilihan presidensial tahun 2020, National Intelligence Council (NIC) menyatakan bahwa tidak ada upaya dari Rusia untuk mengintervensi pemilihan melalui sabotase proses pemilihan, termasuk menyabotase proses registrasi, penghitungan suara, hingga pelaporan hasil. Akan tetapi, NIC melaporkan bahwa Rusia berupaya untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan presidensial melalui penyebaran hoaks terkait sistem pemungutan suara yang tidak kredibel di Amerika Serikat. Rusia juga berupaya untuk memasuki jaringan pemerintah daerah dan nasional sebelum pemilihan presidensial, yang selanjutnya diketahui sebagai serangan siber yang ditujukan untuk merusak jaringan Amerika Serikat, tetapi tidak berkaitan dengan pemilihan presidensial (NIC 2021, 2).

NIC melaporkan bahwa badan intelijen Rusia berupaya untuk mengumpulkan informasi tertentu demi mendukung perumusan kebijakan luar negeri Rusia. Sebagai contoh, pada tahun 2018, intelijen Rusia berusaha untuk melakukan peretasan terhadap organisasi-organisasi yang berhubungan dengan Partai Demokrat. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020, intelijen dari GRU—badan intelijen militer Rusia—juga melakukan upaya peretasan terhadap aktor-aktor politik Amerika Serikat, walaupun disebut gagal dilakukan. GRU kembali melakukan upaya peretasan melalui *phising* terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Burisma Holdings Limited—perusahaan minyak dan gas di Ukraina yang diduga melakukan korupsi bersama dengan Robert Biden, anak kedua

dari Joe Biden—dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait aktivitas keluarga Biden (NIC 2021, 3).

Upaya Rusia tersebut ditujukan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap calon presiden serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan presiden (NIC 2021). Pada kampanye presidensial tahun 2019, Rusia berupaya untuk mengurangi jumlah suara yang masuk, menyorot penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilihan, serta menuduh Partai Demokrat telah melakukan kecurangan. Hal tersebut dilakukan melalui penyebaran *troll* oleh organisasi pengaruh Rusia, Proyek Lakhta. Proyek Lakhta menggunakan Lakhta Internet Research (LIR) untuk menyoroiti isu-isu domestik yang kontroversial di Amerika Serikat. LIR menggunakan akun-akun palsu dari *influencer*, situs berita, ataupun orang-orang penting di Amerika Serikat untuk menyebarkan hoaks ke masyarakat. Dalam hal ini, LIR menyabotase jaringan internet dari negara-negara ketiga, seperti Ghana, Meksiko, dan Nigeria, untuk menyebarkan hoaks dengan tujuan menghindari upaya Amerika Serikat untuk menutup akun-akun palsu milik LIR (NIC 2021, 4).

GRU juga diduga melakukan peretasan terhadap sistem pemilihan resmi dari 21 negara bagian di Amerika Serikat. Di negara bagian Illinois dan Arizona, pemerintah Amerika Serikat melaporkan adanya upaya peretasan terhadap sistem registrasi pemilih (BBC 2017). Pada upaya tersebut, Rusia setidaknya mencuri lebih dari 500.000 informasi pribadi dari pemilih yang selanjutnya digunakan dalam aktivitas pencucian uang oleh pihak Rusia (Nakashima and Harris 2018). Walaupun demikian, pemerintah Amerika Serikat menjelaskan bahwa tidak terdapat upaya

peretasan yang ditujukan untuk memanipulasi jumlah suara yang masuk dalam pemilihan (BBC 2017).

### **3.2 Spionase**

Spionase merupakan aktivitas yang dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer tertentu demi memperoleh informasi rahasia dan sensitif (Rid 2013, 82). Dalam hal ini, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menyesuaikan kebijakan dengan informasi yang ada. Namun, dalam kasus *cyber war* yang dilakukan oleh Rusia, spionase dilakukan untuk mencuri informasi rahasia sebelum akhirnya disebarluaskan di internet. Penyebaran informasi rahasia tersebut terbukti dapat memberikan dampak negatif bagi target, yang selanjutnya berkontribusi dalam upaya Rusia untuk mencapai kepentingannya.

Aksi spionase dalam intervensi Rusia berkaitan dengan tindakan sabotase yang dilakukan oleh GRU sebelumnya. Dalam hal ini, GRU berupaya untuk meretas sistem komputer dan akun pribadi yang dimiliki oleh staf-staf Partai Demokrat di sekitar Clinton. Selanjutnya, peretas pun mengakses informasi yang terdapat di komputer korban, khususnya informasi yang berkaitan dengan pemilihan presidensial, operasi lapangan, kebijakan, dan Trump. Informasi dan isi dari surel yang diretas pun kemudian disalurkan ke WikiLeaks sebelum akhirnya disebarluaskan (Nakashima and Harris 2018).

Diperkirakan terdapat lebih dari 27.000 data yang berhasil diretas oleh Rusia, yang selanjutnya dipublikasikan oleh WikiLeaks pada pertengahan tahun 2016. Sebagian besar data tersebut diperoleh dari staf penting DNC, seperti Ketua

Komunikasi Luis Miranda (10.770 surel), Ketua Keuangan Nasional Jordon Kaplan (3.797 surel), dan lain-lain pada periode Januari 2015 hingga 25 Mei 2016. Perilisan data tersebut dinilai memberi dampak negatif bagi Clinton, karena perilisan itu dilakukan beberapa waktu sebelum Clinton melakukan konvensi nasionalnya di Philadelphia (Hamburger and Tumulty 2016).

Pada November 2016, WikiLeaks mempublikasikan lebih dari 8.000 surel baru yang diperolehnya dari Rusia. Dalam surel-surel tersebut, diketahui bahwa komite nasional dari Partai Demokrat memiliki bias terhadap Clinton dibandingkan dengan pesaingnya, Bernie Sanders, yang selanjutnya merusak citra yang dibentuk oleh Partai Demokrat sebagai partai yang netral. Hal ini dibuktikan dengan beberapa staf DNC yang secara terbuka mendukung terpilihnya Clinton sebagai wakil Demokrat, bahkan mencemooh praktik kampanye Sanders (Baum and Gussin 2016).

Selain itu, peretasan surel staf kampanye Clinton juga menunjukkan informasi penggalangan dana yang selama ini digunakan untuk kampanye dan perkembangan organisasi. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh DNC, hingga penunjukan wakil dalam pertemuan resmi pun, dilakukan atas dasar pertimbangan keuntungan keuangan. Pendorong dengan jumlah donasi besar dapat memiliki kursi di dewan federal, memberikan pengaruh politik yang kuat bagi mereka. Bahkan, beberapa aktivitas tertentu, misalnya perayaan bagi kelompok minoritas, dilakukan hanya dengan tujuan untuk menarik bantuan dana dari pendonor. Menanggapi informasi yang beredar, DNC menyatakan bahwa informasi tersebut salah, dimana perwakilan DNC menyatakan bahwa kursi dewan federal tidak berhubungan dengan nominal yang didonorkan oleh individu (Goodwin

2016). Kondisi ini diperkirakan sebagai salah satu alasan utama dari kekalahan Clinton pada pemilihan presidensial tahun 2016 (Baum and Gussin 2016).

### **3.3 Subversi**

Subversi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengubah tatanan yang ada, salah satunya dengan cara penyebaran informasi yang belum dibuktikan kredibilitasnya. Dalam kaitannya dengan intervensi Rusia, salah satu tindak subversi yang dilakukan oleh Rusia pada pemilihan presidensial Amerika Serikat adalah disinformasi melalui penyebaran hoaks ataupun tuduhan tidak berdasar tentang aktor politik tertentu, khususnya mereka yang menjadi kandidat presidensial. Pada periode pemilihan presidensial tahun 2020, disinformasi yang dilakukan Rusia setidaknya telah dilakukan sejak awal tahun 2019 dengan menargetkan kandidat-kandidat utama dari Partai Demokrat, seperti Kamala Harris, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, dan Beto O'Rourke. Disinformasi dilakukan dengan cara penyebaran meme, tagar, misinformasi, dan hoaks terkait posisi politik dari masing-masing kandidat dengan tujuan untuk mengurangi kredibilitas kandidat tersebut. Di samping itu, disinformasi dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kekacauan dalam pemilihan perwakilan presiden dari Partai Demokrat (Korecki 2019).

Sebagian besar disinformasi dilakukan di media sosial, seperti Twitter dan Facebook, yang dinilai dapat menjangkau masyarakat dalam lingkup lebih luas. Analisis yang dilakukan oleh outlet berita POLITICO menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 200 akun, baik akun persona palsu ataupun akun asli, yang digunakan untuk menyebarkan informasi buruk tentang kandidat presidensial.

Dari 200 akun tersebut, ditemukan lebih dari 6,8 juta *mention* yang ditujukan kepada keempat kandidat presidensial dari Partai Demokrat, dengan *mention* terbanyak diperoleh Kamala Harris, yakni 2,5 juta *mention* dalam waktu 30 hari (Korecki 2019).

Dalam hal ini, Rusia memanfaatkan isu-isu yang dinilai sensitif bagi publik Amerika Serikat. Sebagai contoh, akun-akun Twitter yang diduga dioperasikan oleh Rusia menyebarkan meme dan pesan rasis yang melibatkan Elizabeth Warren, yang memuat narasi tentang orang kulit hitam. Di sisi lain, sebagian besar narasi tentang Kamala Harris menyatakan tentang hubungan masa lalunya dengan mantan walikota San Francisco Willie Brown. Pada topik tersebut, terdapat lebih dari 8,6 juta *mention*, dimana sebagian besar di antaranya melibatkan narasi yang seksis dan rasis yang ditujukan kepada Harris. Selain menargetkan kandidat tertentu, 200 akun tersebut juga menyebarkan narasi tentang kurangnya integritas sistem pemilihan presidensial di Amerika Serikat. Diperkirakan, postingan itu mencapai lebih dari 140 juta *mention* dalam kurun waktu satu tahun (Korecki 2019).

Terpilihnya Joe Biden sebagai perwakilan presidensial dari Partai Demokrat mengubah target subversi yang dilakukan oleh Rusia ke Biden. Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat mempublikasikan laporan terkait ancaman terhadap pemilihan presidensial tahun 2020 pada 10 Maret 2021. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa Vladimir Putin memberikan perintah kepada beberapa agensi pemerintah untuk melaksanakan operasi khusus dengan tujuan untuk mempengaruhi pencalonan presidensial Joe Biden dan Partai Demokrat, dan di waktu yang bersamaan, mendukung pencalonan Donald Trump. Intervensi Rusia tersebut dinilai mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum

dan menimbulkan perpecahan sosial-politik di lingkup domestik (NIC 2021, i). Pada periode tersebut, Rusia menggunakan jaringan yang dimilikinya untuk menyebarkan hoaks dan tuduhan tidak berdasar terkait Biden dengan cara ‘pencucian informasi’, yakni dengan memberikan informasi yang salah dan tuduhan tidak berdasar kepada media—yang sebagian besar memiliki hubungan dekat dengan Trump, dimana selanjutnya media tersebut menyebarkan informasi kepada masyarakat (NIC 2021, 2).

Sebagian besar intervensi Rusia dilakukan melalui jaringan perwakilan Rusia di Ukraina untuk menghindari tuduhan keterlibatan Rusia dalam pemilihan presidensial Amerika Serikat. Dalam hal ini, perwakilan Rusia tersebut menyebarkan narasi tentang relasi yang korup antara Biden dan keluarganya, staf pemerintahan Amerika Serikat, serta pemerintah Ukraina. Narasi tersebut diperkirakan telah dibangun dan disebarluaskan sejak tahun 2014, jauh sebelum Biden mengajukan pencalonannya sebagai presiden Amerika Serikat. NIC menyebut bahwa intervensi Rusia dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kredibilitas calon presiden Amerika Serikat yang dinilai tidak memberikan keuntungan bagi kepentingan internasional Rusia (NIC 2021, 3).

Salah satu perwakilan Rusia yang berada dalam jaringan Ukraina tersebut adalah Konstantin Kilimnik, yang juga memiliki koneksi dengan Federal Security Service (FSB) Rusia. Dalam hal ini, Kilimnik menyebarkan informasi tidak berdasar dengan tujuan untuk menurunkan kredibilitas Biden demi memberikan keuntungan bagi prospek terpilihnya kembali Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Kilimnik juga mendiskreditkan pemerintahan Obama

dengan cara menyebarkan tuduhan korupsi yang dilakukan oleh staf pemerintahan Obama demi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (NIC 2021, 3).

Kilimnik pun bekerja sama dengan legislator Ukraina, Andriy Derkach, untuk melakukan ‘pencucian informasi’ melalui media-media yang berhubungan dengan Trump. Kontak yang dilakukan dengan media Amerika Serikat tersebut berhasil membantu Rusia untuk menayangkan dokumenter yang mendukung Trump pada Januari 2020. Di sisi lain, Derkach merilis empat rekaman audio yang menyatakan tindak korupsi yang dilakukan oleh Biden dan staf pemerintah lainnya terkait kebijakan terhadap Ukraina. Derkach juga secara terbuka mendorong dilakukannya investigasi legal terkait tuduhan tersebut (NIC 2021, 3).

Pada Maret 2020, Brennan Center for Justice mempublikasikan laporan yang menyebut bahwa akun media sosial yang diduga digunakan oleh aktor intelijen Rusia pada periode tersebut tidak lagi memanfaatkan persona palsu untuk menyebarkan hoaks, tetapi mereka justru melakukan tiruan terhadap kandidat politik asli. Hal itu menimbulkan ancaman bagi politik domestik Amerika Serikat karena pernyataan yang dikeluarkan oleh akun tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi pemilih. Pada periode tersebut, ditemukan lebih dari 75.000 postingan yang berasal dari akun palsu yang diketahui dikelola melalui jaringan Rusia (Mie 2020). Tidak lama setelahnya, staf intelijen Amerika Serikat melaporkan bahwa beberapa staf operasi Rusia menyebarkan berita tentang rasisme dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap orang kulit hitam atau keturunan Afrika-Amerika. Selain itu, mereka juga memicu konflik antara kelompok kulit putih dan ekstremis kulit hitam, dengan tujuan untuk memecah belah publik Amerika Serikat (Barnes and Goldman 2020).



**Tabel 1. Ringkasan aplikasi teori *Cyber War* (Thomas Rid) dalam studi kasus intervensi Rusia pada pemilihan Presiden AS periode 2016 dan 2020**

No.	Variabel teori	Aktor	Target	Implementasi
1.	Sabotase	GRU	Partai Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meretas terhadap Partai Demokrat, khususnya staf-staf yang berkaitan dengan Hillary Clinton, pada pemilihan tahun 2016, yang selanjutnya akan disebarluaskan via Internet dengan nama “DCLeaks” dan “Guccifer 2.0” (Ward 2018).</li> </ul>
			Kolese Elektoral Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan presidensial melalui penyebaran hoaks terkait sistem pemungutan suara yang tidak kredibel di Amerika Serikat.</li> <li>Melakukan peretasan terhadap sistem pemilihan resmi dari 21 negara bagian di Amerika Serikat.</li> </ul>
		LIR	Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyabotase jaringan internet dari negara-negara ketiga, seperti Ghana, Meksiko, dan Nigeria, untuk menyebarkan hoaks ke masyarakat menggunakan akun-akun palsu dari <i>influencer</i>, situs berita, ataupun orang-orang penting di AS.</li> </ul>
2.	Spionase	GRU	Partai Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meretas sistem komputer dan akun pribadi yang dimiliki oleh staf-staf Partai Demokrat di sekitar Clinton, yang selanjutnya dipublikasikan oleh WikiLeaks pada pertengahan tahun 2016. Kondisi ini diperkirakan sebagai salah satu alasan utama dari kekalahan Clinton pada pemilihan presidensial tahun 2016.</li> </ul>
3.	Subversi	FSB (Kiliminik)	Joe Biden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyebarkan informasi tidak berdasar dengan tujuan untuk menurunkan kredibilitas Biden demi memberikan keuntungan bagi prospek terpilihnya kembali Trump sebagai presiden Amerika Serikat.</li> </ul>

Di sisi lain, aktor-aktor Rusia kerap mempromosikan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Trump, termasuk pesan politik Trump terkait hasil pemilihan presidensial, debat, kampanye, hingga krisis domestik yang terjadi di Amerika Serikat. Akan tetapi, dalam situasi ketika Trump mengeluarkan

pernyataan yang bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri Rusia, aktor-aktor Rusia akan mengeluarkan narasi yang mendorong agar publik tidak memilih calon manapun dikarenakan tidak ada kandidat yang dinilai layak menjadi presiden Amerika Serikat (NIC 2021, 4).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Perkembangan teknologi mendorong penggunaan media sosial sebagai salah satu instrumen dalam mencapai politik luar negeri suatu negara, tanpa terkecuali Rusia. Rusia diperkirakan memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye hitam dalam pemilihan presidensial Amerika Serikat pada periode tahun 2016 dan 2020. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *cyber war* milik Thomas Rid yang selanjutnya membagi *cyber war* menjadi tiga aktivitas, yaitu sabotase, spionase, dan subversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi Rusia dalam pemilihan presidensial Amerika Serikat tahun 2016 dan 2020 memiliki tiga wujud yang disebutkan oleh Thomas Rid.

Pertama, sabotase. Mayoritas aktivitas sabotase Rusia dilakukan oleh GRU dan LIR. GRU melakukan sabotase dengan cara meretas jaringan internet dan komputer dari staf Partai Demokrat, khususnya yang berkaitan dengan Hillary Clinton, untuk mendapatkan informasi rahasia yang selanjutnya disebarluaskan melalui WikiLeaks. GRU juga melakukan peretasan terhadap sistem pemilu resmi di 21 negara bagian dengan tujuan untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan presidensial Amerika Serikat. Di sisi lain, LIR membuat akun-akun palsu untuk menyebarkan hoaks dengan menggunakan jaringan internet dari negara ketiga, seperti Ghana, Meksiko, dan Nigeria, untuk menghindari tuduhan intervensi dari Amerika Serikat.

Kedua, spionase. Spionase dilakukan melalui peretasan GRU terhadap jaringan internet dan komputer Partai Demokrat untuk mendapatkan informasi rahasia. Informasi tersebut selanjutnya dipublikasikan melalui WikiLeaks dengan tujuan untuk memecah belah Partai Demokrat sendiri, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat yang memiliki citra netral, berkaitan dengan pernyataan negatif dari staf kampanye Clinton terhadap kandidat presidensial lain yang berasal dari Partai Demokrat. Penyebaran informasi ini menjadi salah satu alasan terkuat dari kekalahan Clinton pada pemilihan presidensial tahun 2016.

Ketiga, subversi. Pada aktivitas subversi, Rusia memanfaatkan FSB (Kiliminik) untuk menyebarkan informasi atau tuduhan tidak berdasar terhadap kandidat presidensial yang berasal dari Partai Demokrat, seperti Joe Biden, Kamala Harris, dan Elizabeth Warren. Pasca terpilihnya Joe Biden sebagai wakil dari Partai Demokrat, penyebaran hoaks pun terfokus pada berita-berita tidak berdasar yang bertujuan untuk menurunkan kredibilitas Biden. Hal ini dilakukan agar prospek terpilihnya Donald Trump pada periode kedua menjadi lebih besar. Bahkan, intervensi Rusia dalam pemilihan presidensial Amerika Serikat tahun 2016 dan 2020 disebut sebagai upaya agar Trump kembali terpilih sebagai presiden.

## **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa rekomendasi. Bagi pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan keamanan dalam lingkup siber demi menghindari upaya peretasan yang dilakukan oleh aktor manapun, termasuk Rusia. Bagi pemerintah Rusia untuk menghormati kedaulatan negara lain, yakni Amerika Serikat, dengan tidak

melakukan intervensi dalam aktivitas politik domestik Amerika Serikat. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang relevan, penulis merekomendasikan untuk membahas variable-variabel *Cyber War* lainnya yang dijelaskan oleh Thomas Rid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rohim, N. 2014. "Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi Yang Efektif dan Efisien." *Jurnal Nanggroe* 3 (3): 1-24.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2020. "Pemilu Presiden dan Intervensi Asing: Menyingkap Tuduhan Intervensi Rusia dalam Pilpres di Amerika Serikat dan Indonesia." *Kajian* 24 (1): 1-14.
- Rid, Thomas. 2013. *Cyber War Will Not Take Place*. New York: Oxford University Press.
- Associated Press. 2005. *Putin: Soviet collapse a 'genuine tragedy'*. April 16. Accessed Desember 26, 2023. <https://www.nbcnews.com/id/wbna7632057>.
- Rumer, Eugene. 2023. *Russia's Wartime Foreign Policy: Regional Hegemony in Question*. Agustus 17. Accessed Desember 26, 2023. <https://carnegieendowment.org/2023/08/17/russia-s-wartime-foreign-policy-regional-hegemony-in-question-pub-91107>.
- Tsygankov, Andrei P. 2010. *Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Götz, Elias. 2017. "Putin, the State, and War: The Causes of Russia's Near Abroad Assertion Revisited." *International Studies Review* 19 (2): 228-253. <https://www.jstor.org/stable/26407899>.
- Radin, Andrew, and Clint Reach. 2017. *Russian Views of the International Order*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. [https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RR1826.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1826.html).
- Kotkin, Stephen. 2016. "Russia's Perpetual Geopolitics: Putin Returns to the Historical Pattern." *Foreign Affairs* 95 (3): 2-9. <https://www.jstor.org/stable/43946851>.
- Laurelle, Marlene. 2015. *The "Russian World": Russia's Soft Power and Geopolitical Imagination*. Washington, D.C.: Center on Global Interests.
- Hill, Fiona, and Clifford Gaddy. 2013. *Mr. Putin: Operative in the Kremlin*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Feng, Yujun. 2019. "The US-Russia relations since Trump took office and China's policy choices." *International Relations* 12 (4): 422-434. doi:10.21638/11701/spbu06.2019.402.
- Feng, Yujun. 1999. "Russia and the West: A Historical Review of Clash of Civilizations." *Asia Review*.
- Ponarin, Eduard, and Boris Sokolov. 2014. *The Russian Elite's View of Global Politics*. Desember 18. Accessed Agustus 17, 2023. <https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-russian-elites-view-of-global-politics/>.
- Careaga, Daniela Sandoval, and Alexander Alexeyevich Kornilov. 2020. "Russia and the 2020 U.S. Presidential Election." *Norteamerica* 15 (2): 251-283. doi:10.22201/cisan.24487228e.2020.2.460 .
- Stent, Angela. 2020. *Why are US-Russia relations so challenging?* April 27. Accessed Agustus 17, 2023. <https://www.brookings.edu/articles/why-are-us-russia-relations-so-challenging/>.

- Beckwith, David C. 2023. *United States Presidential Election of 2016*. Agustus 17. Accessed Agustus 20, 2023. <https://www.britannica.com/topic/United-States-presidential-election-of-2016>.
- Zurcher, Anthony. 2016. *US election: Hillary Clinton and Donald Trump compared to world leaders*. September 21. Accessed Agustus 20, 2023. <https://www.bbc.com/news/election-us-2016-37423550>.
- McFaul, Michael. 2016. *Why Putin wants a Trump victory (so much he might even be trying to help him)*. Agustus 17. Accessed Agustus 16, 2023. [https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/why-putin-wants-a-trump-victory-so-much-he-might-even-be-trying-to-help-him/2016/08/17/897ab21c-6495-11e6-be4e-23fc4d4d12b4\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/why-putin-wants-a-trump-victory-so-much-he-might-even-be-trying-to-help-him/2016/08/17/897ab21c-6495-11e6-be4e-23fc4d4d12b4_story.html).
- Warrick, Joby, and Karen DeYoung. 2016. *From 'reset' to 'pause': The real story behind Hillary Clinton's feud with Vladimir Putin*. November 3. Accessed Agustus 21, 2023. [https://www.washingtonpost.com/world/national-security/from-reset-to-pause-the-real-story-behind-hillary-clintons-feud-with-vladimir-putin/2016/11/03/f575f9fa-a116-11e6-8832-23a007c77bb4\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/from-reset-to-pause-the-real-story-behind-hillary-clintons-feud-with-vladimir-putin/2016/11/03/f575f9fa-a116-11e6-8832-23a007c77bb4_story.html).
- Sanger, David E. 2016. *The Hawk on Russia Policy? Hillary Clinton, Not Donald Trump*. Oktober 20. Accessed Agustus 21, 2023. <https://www.nytimes.com/2016/10/21/us/hillary-clinton-donald-trump-putin-russia.html>.
- Morello, Carol, and Adam Taylor. 2016. *Trump says U.S. won't rush to defend NATO countries if they don't spend more on military*. Juli 21. Accessed Agustus 16, 2023. [https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-says-us-wont-rush-to-defend-nato-countries-if-they-dont-spend-more-on-military/2016/07/21/76c48430-4f51-11e6-a7d8-13d06b37f256\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-says-us-wont-rush-to-defend-nato-countries-if-they-dont-spend-more-on-military/2016/07/21/76c48430-4f51-11e6-a7d8-13d06b37f256_story.html).
- Murray, Stephanie. 2018. *Putin: I wanted Trump to win the election*. Juli 16. Accessed Agustus 16, 2023. <https://www.politico.com/story/2018/07/16/putin-trump-win-election-2016-722486>.
- Britannica. 2023. *United States presidential election of 2020*. Agustus 21. Accessed Agustus 22, 2023. <https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-2020>.
- Trenin, Dmitri. 2020. *Joe Biden's Foreign Policy and Russia*. November 19. Accessed Agustus 21, 2023. <https://carnegiemoscow.org/commentary/83270>.
- Ellyatt, Holly. 2020. *Why Russia - and Putin - might be worried about a Biden presidency*. Oktober 20. Accessed Agustus 22, 2023. <https://www.cnn.com/2020/10/20/why-russia-could-be-worried-about-a-biden-presidency.html>.
- NIC. 2021. *Foreign Threats to the 2020 US Federal Elections*. Washington, D.C.: National Intelligence Council.
- Nakashima, Ellen, and Shane Harris. 2018. *How the Russians hacked the DNC and passed its emails to WikiLeaks*. Juli 13. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.washingtonpost.com/world/national-security/how-the-russians-hacked-the-dnc-and-passed-its-emails-to->

- wikileaks/2018/07/13/af19a828-86c3-11e8-8553-a3ce89036c78\_story.html.
- Ward, Alex. 2018. *Read: Mueller indictment against 12 Russian spies for DNC hack*. Juli 13. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.vox.com/2018/7/13/17568806/mueller-russia-intelligence-indictment-full-text>.
- Hamburger, Tom, and Karen Tumulty. 2016. *WikiLeaks releases thousands of documents about Clinton and internal deliberations*. Juli 22. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/07/22/on-eve-of-democratic-convention-wikileaks-releases-thousands-of-documents-about-clinton-the-campaign-and-internal-deliberations/>.
- Baum, Matthew A., and Phil Gussin. 2016. *Why it's entirely predictable that Hillary Clinton's emails are back in the news*. November 1. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/01/why-its-entirely-predictable-that-hillary-clintons-emails-are-back-in-the-news/>.
- Goodwin, Alec. 2016. *Leaks show DNC asked White House to reward donors with slots on boards and commissions*. Juli 26. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.opensecrets.org/news/2016/07/leaks-show-dnc-asked-white-house-to-reward-donors-with-slots-on-boards-and-commissions/>.
- Korecki, Natasha. 2019. *'Sustained and ongoing' disinformation assault targets Dem presidential candidates*. Februari 20. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.politico.com/story/2019/02/20/2020-candidates-social-media-attack-1176018>.
- Burt, Tom. 2019. *New cyberthreats require new ways to protect democracy*. Juli 17. Accessed Januari 1, 2024. <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/07/17/new-cyberthreats-require-new-ways-to-protect-democracy/>.
- Mie, Kim Young. 2020. *New Evidence Shows How Russia's Election Interference Has Gotten More Brazen*. Maret 5. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/new-evidence-shows-how-russias-election-interference-has-gotten-more>.
- Barnes, Julian E., and Adam Goldman. 2020. *Russia Trying to Stoke U.S. Racial Tensions Before Election, Officials Say*. Maret 10. Accessed Januari 1, 2024. <https://www.nytimes.com/2020/03/10/us/politics/russian-interference-race.html>.
- Hodge, Nathan. 2020. *Russia's GRU: Spy agency known for brazenness back in the headlines*. Juni 30. Accessed Januari 3, 2024. <https://edition.cnn.com/2020/06/29/europe/russia-afghanistan-gru-analysis-intl/index.html>.
- BBC. 2017. *US official: Russia 'hacked' 21 US states in election*. Juni 21. Accessed Januari 3, 2024. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40357357>.